

Peran Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

* Putri Anggini Silalahi ¹, Zainal ²

¹Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

*Corresponding Author : putriangginisilalahi@student.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penghulu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan di kepenghuluan tersebut, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peran penghulu. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Penghulu, Sekretaris Kepenghuluan, Kaur Pelaksanaan, BPKep, dan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penghulu dalam penyelenggaraan pembangunan di Kepenghuluan Pasir Putih sudah berjalan dengan baik. Penghulu terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat. Namun, pelaksanaan pembangunan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran dan faktor cuaca yang mempengaruhi efektivitas pembangunan. Selain itu, belum adanya mekanisme evaluasi formal juga menjadi penghambat dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul. Dari hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan anggaran untuk kepenghuluan dan mengembangkan mekanisme evaluasi formal untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan dimasa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan praktik pembangunan ditingkat kepenghuluan.

Kata Kunci: Penghulu, Pembangunan, Kepenghuluan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan

Abstract

This study aims to analyze the role of the village head in the planning, implementation, and supervision processes of development in the village, as well as to identify factors that hinder the role of the village head. The research method used is qualitative, with a descriptive approach. Data was collected through interviews, observations, and documentation. Informants in this study consisted of the village head, village secretary, implementation officer, village consultative body, and community leaders. The results of the study show that the role of the village head in the implementation of development in Pasir Putih village is already running well. The village head is actively involved in development planning through deliberations that involve the community. However, the implementation of development still faces obstacles, particularly in terms of budget constraints and weather factors that affect the effectiveness of development. Additionally, the absence of a formal evaluation mechanism also hinders the identification and resolution of emerging issues. Based on the research findings, it is recommended that the local government increase the budget for the village and develop a formal evaluation mechanism to improve the implementation of development in the future. This study is expected to contribute positively to the development of policies and practices in village-level development.

Keywords : Village Head, Development, Village, Planning, Implementation, Supervision.

PENDAHULUAN

Menurut (Al Aziz, 2022), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang terkecil dikarenakan mempunyai batasan-batasan wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul setempat yang dihormati dan diakui.

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat hak asal usul atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia.

Desa berhak melaksanakan pembangunan desa, pembangunan tersebut meliputi pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang, dibandingkan dengan desa yang belum memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan dari segala ukuran keberhasilan tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat.

Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pembangunan pemerintah desa, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Untuk mengkoordinasikan pembangunan desa, kepala desa juga dapat didampingi oleh tenaga ahli pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga.

Pada kenyataannya saat ini kondisi pembangunan yang belum merata menunjukkan beberapa permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Isu yang masih sering terjadi yaitu mengenai kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta belum adanya pengelolaan sumber daya alam dan potensi secara optimal, pembangunan yang sangat menonjol terjadi di desa yaitu pembangunan desa (yang terlihat hasilnya seperti jalan, irigasi, pasar, tempat ibadah, kantor desa, dan lainnya), masih belum adanya penanganan mengenai pengurangan kesejahteraan antara wilayah dan dukungan pembangunan desa yang belum memadai sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

Pelaksanaan pembangunan desa yang diprakarsai oleh pemerintah desa, dengan anggaran dana desa (ADD) juga perlu melibatkan masyarakat desa dalam proses pelaksanaan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat desa dalam pembangunan desa merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan, keterlibatan masyarakat desa ini meliputi kegiatan mulai dari perencanaan atau proyek pembangunan sampai dengan pelaksanaan yang langsung dikerjakan oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 3 tahun 2023 tentang penyebutan nama Desa menjadi Kepenghuluan. Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Desa Pasir Putih Kepala Desa disebut dengan Penghulu dan Desa disebut dengan Kepenghuluan, karena di Kabupaten Rokan Hilir masyarakat berawal dari orang melayu. Penghulu adalah pejabat pemerintah kepenghuluan yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kepenghuluannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah yang disampaikan kepada bupati melalui camat kepada badan permusyawaratan penghulu (BPK).

Penghulu sebagai pemerintah desa memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu pelayanan dalam bidang pembangunan. Pelayanan pembangunan diwujudkan dengan melakukan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi masyarakat contohnya adalah membangun jalan, jembatan, irigasi, pintu air, dan lampu penerangan, sumur artesis, pos jaga, serta pembangunan dalam bidang pendidikan seperti TK, SD, dan lain-lain. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan kepenghuluan yaitu pelayanan pembangunan, penghulu sebagai kepala pemerintahan perannya sangat penting dalam mewujudkan kepenghuluan yang maju dan makmur.

Adapun yang harus diikuti penghulu dalam kegiatan pembangunan kepenghuluan telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, yaitu:

1. Penghulu sebagai penetapan pelaksanaan kegiatan
2. Penghulu sebagai penyusun rencana kerja
3. Penghulu melakukan sosialisasi kegiatan
4. Penghulu ikut memberikan pembekalan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat
5. Penghulu menyiapkan dokumen administrasi yang akan dipertanggung jawabkan
6. Penghulu dapat melakukan pengadaan tenaga kerja tentunya disarankan tenaga local
7. Penghulu ikut mengawasi pengadaan bahan/material

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah pembangunan yang belum merata, khususnya dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sumber daya alam. Banyak kepenghuluan yang masih tertinggal akibat kurangnya perencanaan yang matang dan keterbatasan anggaran. Disisi lain, keterlibatan masyarakat kepenghuluan dalam pembangunan sering kali masih rendah, meskipun peran aktif mereka sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan.

Adapun penggunaan dana kepenghuluan dari ABPKep pasir putih tahun 2023 dapat dilihat dari data yang ditampilkan dibawah ini:

Tabel. 1
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kepenghuluan Pasir Putih Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang
		Semula	Menjadi	
1	2	3	4	5
4.	Pendapatan			

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ Berkurang
4.2.	Pendapatan Transfer	2.490.902.664,00	2.668.907.664,00	178.005.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-Lain	0,00	78.269.697,00	78.269.697,00
	Jumlah Pendapatan	2.490.902.664,00	2.747.177.361,00	256.274.697,00
5.	Belanja			
5.1.	Belanja Pegawai	589.372.471,00	589.372.471,00	0,00
5.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.176.453.912,00	1.210.575.609,00	34.121.697,00
5.3.	Belanja Modal	761.692.899,00	987.164.899,00	225.472.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	234.000.000,00	234.000.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	2.761.519.282,00	3.021.112.979,00	259.593.697,00
	Surplus/(Defisit)	(270.616.618,00)	(273.935.618,00)	(3.319.000,00)
6.	Pembiayaan			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	273.935.618,00	273.935.618,00	0,00
6.1.1.	Silpa Tahun Sebelumnya	273.935.618,00	273.935.618,00	0,00
	Pembiayaan Netto	273.935.618,00	273.935.618,00	0,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Pembiayaan Anggaran	3.319.000,00	0,00	(3.319.000,00)

Sumber: Kantor Kepenghuluan Pasir Putih , Tahun 2023

Dari hasil observasi awal, peneliti melihat kurang optimalnya penghulu sebagai pemimpin di kepenghuluan pasir putih yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pembangunan berjalan lancar, terlihat peran penghulu belum optimal, seperti masih adanya jalan kepenghuluan yang belum disemenisasi dan drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadi banjir peluapan air ke tengah jalan. Ini bertolak belakang dengan tugas penghulu yang telah diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menemukan fenomena yang akan di bahas ini yang dianalisis berdasarkan aturan dan teori yang relevan dengan penelitian, Adapun fenomenanya yaitu:

1. Penghulu dalam melaksanakan pembangunan di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir masih terlihat belum maksimal dalam pembangunan di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, karena masih banyaknya pembangunan yang belum terealisasi seperti pembangunan jalan, drainase, dan jembatan.
2. Minimnya peran pengawasan terhadap kepenghuluan sehingga masih terdapatnya kekurangan dalam proses pembangunan di Kepenghuluan Pasir Putih.

METODE

Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, semakin mendalam dan terdali suatu data yang didapatkan, maka bisa diartikan pula bahwa semakin bisa kualitas penelitian tersebut. Maka dari segi besarnya responden atau objek penelitian. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dll, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontes khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakan suatu penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir untuk meneliti Peran Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir.

Identifikasi informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, artinya informan yang lebih mengetahui pertanyaan penelitian dipilih secara langsung. Adapun informasi informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penghulu Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir
2. Sekretaris Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir
3. Kaur Pelaksanaan Dan Pembangunan
4. Badan Pengawas Kepenghuluan (BPKep)
5. Tokoh Masyarakat

Pemilihan teknik pengumpulan data sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian yang harus di sesuaikan dengan tujuan penelitian, jenis data yang dibutuhkan, sumber daya yang tersedia, dan pertimbangan etis. Maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik observasi, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi keadaan yang sebenarnya dari variabel yang sedang di teliti.
2. Teknik wawancara, melibatkan interaksi langsung dengan semua pihak yang terikat dengan masalah yang sedang diteliti. Tujuannya adalah untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dilapangan.
3. Teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dengan dokumen-dokumen yang berupa gambar atau lainnya, dan teknik ini juga sebagai bukti bahwa peneliti bener-bener turun ke lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil peran penghulu dalam penyelenggaraan pembangunan di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir

a. Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan

Perencanaan adalah proses awal dalam pembangunan yang mencakup identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan prioritas, serta penyusunan rencana kegiatan pembangunan. Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk merumuskan tujuan, strategis, dan program pembangunan di wilayah kepenghuluan berdasarkan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, dan kebijakan pemerintah.

Kabupaten Rokan Hilir, peneliti menemukan perencanaan pembangunan di Kepenghuluan Pasir Putih menunjukkan upaya yang cukup terstruktur dalam mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup warga. Proses perencanaan melibatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah kepenghuluan fondasi penting dalam menentukan prioritas pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting yang telah diakui oleh semua informan. Penghulu Pasir Putih membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, yang berkontribusi pada relevansi dan efektivitas rencana pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa penghulu berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.

b. Pelaksanaan Pembangunan Kepenghuluan

Pelaksanaan adalah konsep atau kerangka berpikir yang menjelaskan bagaimana suatu kebijakan, program, atau rencana dapat dijalankan secara efektif. Pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau upaya penghulu serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan sesuai apa yang dicita-citakan.

Pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dalam pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang diinginkan oleh masyarakat. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Berdasarkan obsevasi yang dilakukan peneliti terhadap Peran Penghulu Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari pelaksanaan pembangunan kepenghuluan pasir putih, peneliti menemukan penghulu pasir putih sudah berperan cukup baik karena pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan pembangunannya. Tetapi dalam pelaksanaan pembangunan masih menghadapi beberapa kendala dalam hal pelaksanaan pembangunan yaitu dalam hal keterbatasan anggaran penghulu pasir putih menjelaskan bahwa alokasi dana sudah diatur oleh pemerintah pusat, sehingga tidak semua permintaan masyarakat dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik dalam pelaksanaan pembangunan, keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama. Kendala selanjutnya yaitu faktor cuaca juga menjadi penghambat bagi pelaksanaan pembangunan. Cuaca yang tidak menentu sering menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan. Meskipun ada beberapa kendala, pelaksanaan pembangunan dikepenghuluan pasir putih dinyatakan berjalan efektif dan tepat sasaran. Bahwa

pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan perencanaan yang ada, meskipun ada masalah terkait dengan anggaran dan cuaca.

c. Pengawasan Pembangunan Kepenghuluan

Pengawasan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, tujuan, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya serta hasil pembangunan yang dicapai. Pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat diselenggarakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam pengawasan pembangunan penghulu pasir putih memiliki peran yaitu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan di kepenghuluan pasir putih dilakukan secara langsung oleh penghulu dan melibatkan masyarakat. Meskipun pengawasan telah dilakukan secara langsung, belum terdapat mekanisme evaluasi yang baku dan terstruktur terhadap pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadi kelemahan utama karena ketiadaan sistem evaluasi membuat sulit untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, mengevaluasi keberhasilan program secara objektif, serta merumuskan perbaikan kedepan. Keterlibatan masyarakat sebagai pekerja dalam proyek pembangunan juga menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas.

Adapun faktor-faktor yang menghambat peran penghulu dalam penyelenggaraan pembangunan dikepenghuluan pasir putih adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan infrastruktur kepenghuluan. Seharusnya, dengan anggaran yang memadai penyelenggaraan pembangunan dikepenghuluan dapat meningkatkan kualitas pembangunan di kepenghuluan tersebut. Dengan adanya anggaran kepenghuluan yang cukup dapat memastikan bahwa keseluruhan kebutuhan dasar masyarakat kepenghuluan terpenuhi secara merata dan berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan anggaran kerap menjadi faktor penghambat untuk penyelenggaraan pembanguann dikepenghuluan yang saat ini terjadi.

Hal ini mengakibatkan penghulu tidak dapat mengakomodasi semua permintaan masyarakat, sehingga prioritas pembangunan harus ditentukan dengan cermat. Keterbatasan dana ini juga membuat pembangunan harus dilakukan secara bertahap dan prioritas, sehingga beberapa wilayah belum tersentuh pembangunan secara merata.

2. Belum adanya mekanisme evaluasi formal

Kurangnya mekanisme evaluasi formal terhadap pelaksanaan proyek pembangunan membuat penghulu kesulitan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang muncul dilapangan. Tanpa evaluasi yang sistematis, perbaikan dan peningkatan kualitas pembangunan menjadi sulit dilakukan. Meskipun pengawasan telah dilakukan secara langsung oleh penghulu dan melibatkan berbagai pihak seperti BPKep, konsultan pengawasan, dan masyarakat, namun belum terdapat mekanisme evaluasi formal terhadap pelaksanaan pembangunan. Tiadak adanya tolak ukur formal untuk menilai keberhasilan atau kekurangan dari suatu proyek pembangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut:

Peran penghulu dalam penyelenggaraan pembangunan di Kepenghuluan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan bahwa penghulu telah berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya merata. Penghulu melakukan koordinasi langsung dengan perangkat kepenghuluan dan masyarakat untuk memastikan kelancaran pembangunan serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan belum adanya mekanisme evaluasi formal yang menghambat efektivitas program pembangunan. Keterlibatan masyarakat sebagai pekerja proyek juga diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, M. V. N. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2404>
- Minahasa, M. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, 5(1).
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyebutan Nama Desa Menjadi Kepenghuluan